

SANG RAJA YANG TELANJANG: RANTAI PASOK GARMEN DI MASA PANDEMI

Pengantar

Pandemi COVID-19 menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian di seluruh dunia – mengakibatkan krisis sosial-ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengakibatkan perpindahan pekerja besar-besaran yang timbul karena hilangnya pekerjaan, dan pada saat yang sama, mengekspos kerentanan ekonomi yang sangat terglobalisasi. Pada 9 April, India telah melaporkan 5734 kasus COVID-19 sementara Indonesia telah mencatat 2956 kasus, Sri Lanka 189 kasus, dan Kamboja 118 kasus.

Secara umum, ada dua jenis respon terhadap pandemi COVID-19 di Asia terkait dengan status produksi/manufaktur dalam perekonomian:

1. Shutdown total - Ini meliputi penghentian total kegiatan produksi, dengan negara menyatakan penutupan (*lockdown*) penuh secara nasional seperti yang dilakukan India atau pemberlakuan jam malam di Srilangka.
2. Shutdown sebagian - ini terjadi di negara-negara di mana pabrik tetap berfungsi, tetapi dengan pembatasan seperti larangan pertemuan keagamaan, konser, kasino, dan bioskop di Kamboja atau mengkarantina wilayah tertentu seperti di Indonesia.

Perbedaan dalam bagaimana negara merespon krisis COVID-19 ini memiliki dampak yang berbeda-beda di berbagai negara dan wilayah, menghasilkan permasalahan-permasalahan khusus di negara tersebut terkait dengan kehidupan pekerja di rantai pasokan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh suatu bergantung pada faktor-faktor politik seperti sifat negara tersebut dan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, termasuk peran yang dimainkan oleh industri berorientasi ekspor seperti industri tekstil dan pakaian jadi. Ketakutan bahwa penutupan (*lockdown*) total ekonomi akan menyebabkan keruntuhan ekonomi dalam negeri juga merupakan faktor utama yang memaksa negara-negara seperti Kamboja dan Indonesia untuk mengadopsi penutupan sebagian.

Tren di Industri Tekstil

Pandemi yang muncul di Cina kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika Utara dan sekarang menyebar dengan cepat di negara-negara produsen utama tekstil dan pakaian jadi di Asia, memiliki dampak berbeda pada berbagai simpul rantai pasokan global. Pada fase awal pandemi, melambatnya pasokan bahan baku Cina telah berdampak buruk pada produksi di Indonesia, Kamboja dan Sri Lanka. India relatif kurang terpengaruh oleh faktor ini, karena ekonomi domestiknya yang relatif besar; dan laporan dari minggu pertama bulan Maret mengindikasikan bahwa India berencana untuk meningkatkan produksi tekstil dan pakaian jadi untuk memenuhi peningkatan permintaan yang diharapkan. Namun, pengumuman tiba-tiba India tentang penutupan (*lockdown*) secara nasional selama 21 hari sejak 25 Maret 2020 menyebabkan penghentian total aktivitas produksi, yang berdampak buruk pada rantai pasok dalam negeri. Laporan terbaru menunjukkan bahwa produksi akan

turun secara signifikan pada kuartal ini, dengan efek yang terus berlanjut selama beberapa bulan mendatang dan mengarah ke dampak negatif pada lapangan kerja.¹

Tren baru-baru ini menunjukkan kebangkitan kembali pasokan bahan baku dari Cina, tetapi kurangnya permintaan dari pembeli telah menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar. Pemasok di Kamboja dan Bangladesh telah mendesak brands dan retailer untuk menghormati kontrak pembelian serta kewajiban untuk membayar barang yang sudah diproduksi atau sedang dalam proses produksi. Asosiasi industri tekstil di India telah menuntut agar pemerintah membuat paket khusus termasuk dukungan keuangan untuk mengatasi dampak negative yang dirasakan industri.²

Sementara beberapa pembeli internasional telah berkomitmen untuk membayar pesanan yang telah diproduksi atau sedang diproduksi, beberapa brands telah membatalkan pesanan tanpa jaminan pembayaran yang telah membebani supplier secara tidak proporsional. Beberapa brand telah mengajukan klausul *Force Majeure*, namun tidak menyebutkan secara khusus pandemi sebagai alasan kegagalan membayar, dan yang lebih penting berdampak bagi pihak dengan kewajiban kontrak yang paling relevan, yaitu para suppliers dan bukan pembeli.

Laporan terbaru dari India, Bangladesh, dan Sri Lanka mengungkapkan bahwa brands meminta diskon hingga 30% dari pemasok, yang tidak masuk akal karena keuntungan yang diperoleh saat penjualan sedang tinggi tidak pernah benar-benar menguntungkan supplier atau pekerja di negara produsen. Selain itu, penjualan saat ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menegosiasikan kembali harga garmen yang akan dikirim saat ini atau dalam waktu dekat. Namun, juga tidak pasti kapan akan ada kebangkitan permintaan konsumen (dan penjualan) karena dampak ekonomi pandemi. Ketidakpastian ini secara signifikan mempengaruhi kekayaan perusahaan skala kecil yang beroperasi dengan margin keuntungan yang kecil dengan modal kerja kecil, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan mereka untuk bertahan dalam jangka pendek hingga menengah.

Sementara pemerintah diharapkan untuk turun tangan, paket ekonomi yang diumumkan, misalnya di India dan Kamboja sangat tidak memadai jika dibandingkan dengan dampak pandemi terhadap mata pencaharian pekerja. Selain itu, ada ketidakjelasan dan perhatian yang rendah terhadap detail implementasi seperti adanya *road map* kebijakan jelas, yang mengakibatkan implementasi terjadi serampangan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan. Hal ini karena komitmen negara terhadap fundamentalisme fiskal, yang telah bersedia ditinggalkan Indonesia dengan menghilangkan target defisit fiskal dengan mengumumkan dua paket ekonomi. Namun, langkah-langkah ini masih dianggap tidak memadai untuk menghentikan PHK massal pekerja. Dengan demikian beban dari ketidakstabilan ini ditanggung secara tidak proporsional oleh para pekerja, yang belum mendapatkan upah layak bahkan pada masa-masa normal.

Upah dan Jaminan Sosial

Upah pekerja garmen adalah upah tingkat kemiskinan bahkan dalam keadaan normal. Pada saat krisis ekonomi umum, situasi dengan cepat memburuk tanpa adanya dukungan terhadap para pekerja. Sementara pemerintah di India, Sri Lanka dan Kamboja telah mengeluarkan arahan untuk membayar kompensasi kepada pekerja bila penutupan pabrik

terjadi. Hal ini umumnya berlaku untuk pekerja tetap dan bukan pekerja kontrak jangka pendek atau pekerja borongan yang jumlahnya adalah mayoritas di industri tekstil dan pakaian jadi. Strategi langsung perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian adalah mengurangi biaya produksi terutama biaya tenaga kerja - baik melalui pengurangan upah atau melalui PHK. Berdasarkan bukti yang ada, ada enam mekanisme yang dapat diidentifikasi dengan mana pendapatan pekerja dipengaruhi, sehingga memicu ketidakpastian -

1. Tidak membayar upah selama periode pembatasan (*lockdown*);
2. Keterlambatan pembayaran upah 10-20 hari;
3. Penggantian upah dengan pinjaman jangka pendek yang diajukan oleh kontraktor / pemberi kerja yang harus dibayar dengan atau tanpa bunga;
4. Pembayaran upah untuk pekerjaan yang belum selesai;
5. PHK tanpa uang pesangon;
6. Pembayaran upah sebagian dengan dukungan pemerintah

Di pusat-pusat industri di India - Gurgaon, Tirupur, Surat dan Ahmedabad - pekerja belum mendapat upah penuh untuk bulan lalu, yang bertentangan dengan arahan pemerintah. Selain itu, pekerja di pabrik kecil di wilayah ini telah diberitahu akan ada penundaan pembayaran upah sekitar 10-20 hari. Dalam kasus pekerja kontrak di Ludhiana, Gurgaon dan Ahmedabad, kebanyakan dari mereka adalah migran - banyak yang telah ditelantarkan oleh kontraktor buruh mereka dan bahkan belum menerima upah untuk bulan Maret. Selain itu, di Gurgaon, beberapa kontraktor / majikan buruh menolak untuk membayar upah pekerja mereka selama periode *lockdown* tetapi sebaliknya menawarkan mereka pinjaman - yang harus dibayar pekerja setelah mereka mulai bekerja lagi.

Di Srilangka, pekerja garmen yang seharusnya dibayar pada 10 Maret telah menerima upah, sementara mereka yang seharusnya dibayar pada 25 dan 30 Maret belum menerima upah apa pun. Industri pakaian jadi Srilangka kemungkinan akan memberhentikan setidaknya 30 persen pekerjanya termasuk staf tetap ketika mereka menerima pesanan global untuk membuat masker wajah dan gaun bedah.⁴

Baik Indonesia dan Kamboja telah melaporkan pemutusan massal ribuan pekerja. Pada tanggal 1 April, setidaknya 91 pabrik garmen di Kamboja telah menanggukkan pekerjaan dengan 61.500 pekerja yang terkena dampak,⁵ dan di Indonesia 2008 perusahaan telah memberhentikan 16.065 pekerja karena krisis Covid-19.⁶ Ada beberapa contoh protes terhadap pemotongan upah dan PHK juga - misalnya, pekerja di PT Bintang Inti Karya, Jawa Timur memprotes keputusan sepihak perusahaan untuk membayarkan hanya setengah dari upah untuk tiga bulan mendatang, setelah itu pemerintah bersedia untuk membayar sisanya. Ada juga protes besar di PT Hair Star Indonesia, produsen wig yang berusaha mem-PHK secara sepihak ketika mereka menolak menerima upah di bawah upah minimum yang ditawarkan perusahaan.

Dalam kasus Kamboja, pemerintah mengumumkan bahwa pekerja garmen yang terkena dampak krisis ini akan menerima 60% dari upah minimum, yang akan berjumlah \$ 114 per bulan, tetapi sesuai laporan terakhir, pekerja hanya akan menerima flat pembayaran \$ 70 per bulan - yang kira-kira 37% dari upah minimum. Ini juga dapat menekan ekonomi

pedesaan karena penurunan remitansi yang dikirim pekerja kepada keluarga di kampung halaman. Kurangnya penegakan hukum atau tidak adanya mekanisme jaminan sosial yang memadai berarti bahwa pekerja dapat kehilangan uang pesangon serta bonus dan kompensasi lain yang menjadi hak mereka selama masa krisis. Perlu dicatat bahwa sebagian besar ketentuan ini tidak tersedia untuk pekerja migran yang bekerja berdasarkan kontrak dalam perusahaan skala kecil maupun industri berbasis rumah tangga dan merupakan kelompok yang paling terpengaruh dalam rantai pasokan global. Inilah mengapa migrasi sebagai sebuah fenomena serta kondisi pekerja migran, menuntut intervensi segera untuk mengurangi krisis sosial ekonomi yang dipicu oleh pandemi ini.

Eksodus Pekerja Migran

Para pekerja migran yang terkena dampak karena penangguhan kegiatan ekonomi atau penghematan yang dilakukan industri berusaha kembali ke kampung halaman mereka, memicu eksodus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Besarnya migrasi pulang ini disebabkan faktor pendorong, terutama terkait dengan tidak adanya pekerjaan, paparan risiko yang lebih besar serta meningkatnya biaya hidup di daerah perkotaan / industri; serta faktor-faktor penarik yang terkait dengan alasan budaya (mendekati Paskah, Ramadhan, dan Tahun Baru Khmer), dan rasa aman secara umum terkait dengan kembali pulang ke keluarga di masa-masa sulit. Tiga jenis aliran migrasi dapat dilihat saat ini - intra-regional (dalam suatu provinsi di suatu negara), antar-regional (antara provinsi di dalam suatu negara) dan internasional (antar negara).

- a. Migrasi intra-regional, dari kota/kabupaten wilayah industri ke kota/kabupaten non-industri yang lebih miskin dalam suatu negara di suatu negara. Dua kasus yang terjadi memperlihatkan dampak perbedaan kebijakan negara terhadap pekerja. Di Jharkhand, India para pekerja dapat kembali ke distrik asal mereka menggunakan transportasi yang tersedia ketika *lockdown* terjadi di India; sementara di Gujarat, India para migran harus berjalan secara massal dari wilayah selatan (tempat industri terkonsentrasi) ke wilayah utara (kampung halaman pekerja migran). Ini terjadi karena lemahnya implementasi *lockdown* di Gujarat karena beberapa perusahaan melanjutkan produksi meskipun ada perintah untuk menutup, dan pada saat arahan negara diberlakukan secara ketat, angkutan umum dan pribadi tidak tersedia.
- b. Migrasi massal antar-daerah, terutama antar provinsi di suatu negara, memperlihatkan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah-masalah seperti itu.

Di Indonesia, lebih dari 100.000 pekerja migran telah pindah dari Jawa Barat (provinsi terpadat di Indonesia) ke daerah asal mereka, meskipun didesak oleh pemerintah untuk tidak kembali ke rumah. Pemerintah belum mengembangkan strategi konkret untuk mengatasi eksodus migran, meskipun ada lonjakan jumlah COVID-19 kasus. Di Sri Lanka, pekerja garmen di Zona Perdagangan Bebas Katunayaka (FTZ) dan FTZ Biyagama di mana lebih dari 10.000 migran bekerja dan tinggal, dibantu oleh pemerintah Sri Lanka di bawah tekanan dari serikat pekerja dan LSM dipulangkan ke rumah mereka. Laporan lapangan menunjukkan bahwa para pekerja diskriminasi, didaftarkan pada polisi dan harus melakukan karantina mandiri begitu mereka tiba di rumah. Meskipun ada beberapa keterlambatan dalam memberikan bantuan segera kepada para pekerja, pemerintah Sri

Lanka melakukan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah India dalam menangani situasi tersebut.

India mengalami perpindahan orang dalam skala besar yang telah mendapat banyak perhatian media. Krisis terjadi setelah festival Holi yang penting di India Utara yang biasanya berdampak pada pekerja yang menerima upah tingkat kemiskinan, dengan tabungan menipis, dan belum lagi hutang. Pekerja migran meninggalkan pusat industri seperti Ahmedabad, Surat, Gurgaon, dan Noida untuk kembali ke rumah mereka di Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, dan Orissa. Di India Utara, tidak adanya transportasi memaksa pekerja untuk berjalan ratusan kilometer yang memperlihatkan ketidakmampuan dan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib pekerja miskin. Beberapa pekerja migran, misalnya, yang bekerja di industri tekstil di Ludhiana yang sedang dalam perjalanan ke rumah mereka di berbagai distrik di Uttar Pradesh dan Bihar terdampar di tengah jalan di Saharanpur dan dipaksa ke rumah penampungan di mana mereka hanya diberi satu kali makan per hari dan tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi bersih.

Setidaknya 22 migran meninggal di India ketika mencoba berjalan kembali ke rumah setelah *lockdown* diberlakukan. Sekelompok pekerja di Bareilly, Uttar Pradesh harus mengalami diskriminasi kelas karena mereka 'disanitasi' menggunakan selang, yang dokumentasi video mengenai proses ini banyak beredar di media sosial dan memicu kemarahan. Para pekerja yang berhasil mencapai tujuan mereka, misalnya, di Bihar harus menghadapi pengucilan dari penduduk - mereka tidak diizinkan memasuki desa mereka atau diserahkan kepada polisi dan tidak diizinkan mengakses sistem air publik. Di kasus lain dari Uttar Pradesh, seorang lelaki migran Dalit yang berada di karantina di sebuah sekolah desa menggantung diri di pohon setelah ia dipukuli dan dihina oleh seorang petugas polisi karena terlihat di depan umum berusaha mendapatkan makanan, yang tidak tersedia di fasilitas karantina. Contoh-contoh semacam itu dari India sekali lagi mengungkapkan kesenjangan mendalam dalam masyarakat yang didasarkan pada kasta, kelas, dan diskriminasi berbasis gender selama berabad-abad.

- c. Migrasi internasional, terutama dapat dilihat dari kondisi buruk para migran Kamboja di industri garmen Thailand. Ribuan pekerja kembali dari Thailand ke Kamboja karena produksi berkurang di Thailand dan laporan lapangan mengungkapkan bahwa mereka sangat khawatir apakah akan mendapatn pekerjaan lagi ke depan. Arus migrasi ini mencakup migran dengan dokumen maupun migran tidak berdokumen, dengan migran yang lebih berisiko tereksplotasi karena status hukumnya yang tidak pasti.

Warga Kamboja yang masih di Thailand rentan secara finansial karena biaya hidup yang lebih tinggi di kota dan juga karena mereka tidak memenuhi syarat untuk skema jaminan sosial yang disponsori negara. Mereka lebih memilih untuk tetap bertahan karena takut tertular virus selama perjalanan bus yang penuh sesak saat melintasi perbatasan, keengganan untuk dikarantina dalam kondisi yang buruk di negara asal mereka, serta relatif tidak siapnya tempat-tempat asli mereka untuk menangani krisis wabah ini.

Layanan Kesehatan

Pekerja miskin dihadapkan pada risiko besar tertular virus di semua tahap dari tempat tinggal mereka hingga di pabrik tempat mereka bekerja, termasuk selama di perjalanan. Di asrama/rumah, pekerja garmen tinggal berjejalan di ruang tertutup di mana satu kamar digunakan bersama oleh 5-10 orang tanpa akses fasilitas sanitasi yang bersih, menempatkan pekerja pada risiko yang sangat besar.

Di Bengaluru, laporan lapangan mengungkapkan bahwa beberapa pekerja di asrama bertahan hidup dengan makan sekali sehari, karena tidak ada yang mengelola makanan untuk mereka dan mereka tidak diijinkan untuk meninggalkan rumah/asrama. Di Tamil Nadu, pekerja yang terlibat membuat masker untuk rumah sakit, terus bekerja dalam jarak dekat di dalam pabrik yang menimbulkan kekhawatiran besar tentang potensi penularan virus. Fasilitas sanitasi yang tidak memadai di asrama dan pabrik meningkatkan risiko pajanan serta penularan virus meskipun hanya ada satu kasus infeksi yang terjadi. Di Bengaluru, pekerja bangkit melawan sebagai protes atas ketidakpedulian manajemen dan merek terhadap keselamatan dan kesehatan mereka. Meskipun mereka diberikan cuti setelah melakukan protes, mereka belum menerima gaji mereka selama periode *lockdown*.

Di Kamboja dan Indonesia, di mana pekerja garmen terus bekerja, fasilitas transportasi terlalu padat, sehingga melanggar norma jarak sosial. Di Indonesia, di pabrik-pabrik di mana produksi berlanjut, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan - yang tidak cukup efektif karena pembawa virus bisa tanpa gejala selama periode rata-rata dua minggu.

Sangat penting untuk diingat bahwa ini adalah kelanjutan logis dari ketidakpedulian bertahun-tahun yang mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan pekerja untuk keuntungan jangka pendek, meskipun serikat pekerja berulang-ulang menuntut kondisi yang lebih manusiawi. Contoh-contoh yang disebutkan di atas memperjelas bahwa jarak sosial (*physical distancing*) adalah hak istimewa buat sekelompok orang dan bukan untuk semuanya. Buat mayoritas buruh, mereka jauh lebih peduli tentang ketakutan di depan mata akan kelaparan dan kehilangan pekerjaan daripada ketakutan yang tidak terlihat akan pandemi. Ini memaksa mereka terus bekerja, meskipun ada kekhawatiran tertular virus.

Dua poin penting tambahan juga perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, pekerja, terutama rumah tangga migran belum dapat mengakses perawatan yang memadai untuk kondisi kesehatan yang ada karena kurangnya sumber daya kesehatan serta praktik-praktik diskriminasi di tingkat lokal. Sebagai contoh, layanan kesehatan ibu dan anak menjadi keprihatinan besar bagi pekerja migran yang miskin di India, dengan laporan lapangan dari Gujarat mengungkapkan bahwa seorang wanita hamil migran harus membayar sangat mahal untuk menggunakan layanan fasilitas swasta karena layanan kesehatan publik tidak dapat diakses.

Kedua, dalam kasus wabah Covid-19, para pekerja mungkin terpaksa harus menanggung pengeluaran terkait bencana kesehatan yang berikutnya dapat mengikatkan mereka semakin terpuruk jauh dalam kemiskinan dan hutang yang lebih besar. Dengan tabungan yang sedikit atau tanpa tabungan, meningkatnya pengeluaran kesehatan dapat menyebabkan perampasan absolut bagi banyak keluarga kelas pekerja - yang akan diperparah memburuknya kesehatan anggota keluarga serta berkurangnya lapangan kerja.

Ini mencerminkan permasalahan struktural seperti kurangnya dana kesehatan publik di seluruh dunia karena komitmen ideologis terhadap ekonomi neoliberal yang menuntut negara melakukan pembatasan (*austerity*). Ini menempatkan pekerja miskin dalam situasi yang sangat berbahaya, dan dalam situasi krisis COVID-19 ini, mereka harus menghadapi krisis ganda, yaitu krisis terkait kesehatan mereka dan krisis terkait mata pencaharian. Beberapa laporan juga menunjukkan adanya lonjakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan dari latar belakang yang terpinggirkan, yang memiliki sedikit atau tidak ada akses ke mekanisme formal untuk mengangkat isu-isu ini.

Catatan Akhir

Pandemi virus corona telah memicu krisis sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya - di mana terjadi krisis permintaan dan penawaran yang dapat memicu krisis berikutnya, yang mana pekerja di rantai pasokan global adalah beberapa dari yang paling parah terkena dampaknya. Tidak ada konsensus yang jelas tentang kapan akan terjadi pertumbuhan ekonomi kembali, yang menempatkan pekerja miskin dalam keadaan penuh ketidakpastian. Laporan ini mencoba untuk melihat upaya-upaya yang terjadi di tingkat lokal di empat negara utama industri tekstil dan pakaian jadi di Asia. Perhatian khusus diberikan pada dampak pandemi dan respon institusional negara dalam empat dimensi, yaitu: pembayaran upah, jaminan sosial, migrasi dan layanan kesehatan.

Dalam suatu sistem yang menempatkan keuntungan lebih tinggi di atas manusia, upah adalah yang pertama dipotong, dan jaminan sosial bagi pekerja miskin dihancurkan. Layanan kesehatan umum sangat kekurangan dana dan tidak memadai. Buruh migran adalah salah satu dari yang paling rentan yang terkena dampak negatif akibat COVID-19 dengan upah yang rendah dan dikucilkan dari kategori kelompok tenaga kerja. Dalam skenario ini, penting untuk memperhatikan dua poin ini.

Pertama, pemerintah yang diharapkan dapat bertindak di tengah situasi seperti ini, tidak melakukan apa yang seharusnya karena komitmen terhadap fundamentalisme fiskal yang membatasi kapasitas pembelanjaan negara di masa-masa normal, apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini. Meninggalkan ekonomi neoliberal dengan mengadopsi kebijakan perpajakan progresif, redistribusi kekayaan, paket stimulus besar-besaran yang bertujuan melindungi mata pencaharian serta peluang kerja, secara ekstensif memperbaiki sistem kesehatan publik dan melindungi kebebasan untuk berserikat adalah langkah-langkah ke depan yang perlu diambil pemerintah.

Kedua, sangat penting untuk dicatat bahwa persaingan antar brand dalam industri *fast fashion* telah menekan upah dengan hanya memberikan sedikit atau tanpa perlindungan kepada pekerja di negara-negara berkembang. Perlombaan untuk menghasilkan lebih banyak telah menjadi perlombaan terjun ke jurang bagi pekerja miskin, dengan pemasok lokal semakin mengandalkan pekerja kontrak yang tinggal dan bekerja dalam kondisi yang semakin berbahaya. Merupakan tanggung jawab etis dan ekonomis dari brands untuk bertindak dan merumuskan mekanisme untuk melindungi mereka yang memberikan keuntungan kepada brand, dari kerentanan-kerentanan yang tidak terduga. Langkah besar ke depan untuk ini adalah mendorong perundingan bersama melalui serikat pekerja serta memperkuat solidaritas dalam gerakan buruh.

Rujukan

1. Potential Impact of COVID-19 on the Indian Economy (KPMG Apr 2020). <https://home.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2020/04/potential-impact-of-covid-19-on-the-Indian-economy.pdf>
2. Textile associations seek financial support to mitigate coronavirus impact (The Hindu, Mar 17, 2020). <https://www.thehindu.com/news/cities/Coimbatore/textile-associations-seek-financial-support/article31093800.ece>
3. Abandoned? The Impact of COVID-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains – CWGR Research Report (Mark Anner, Mar 27, 2020). <https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020-1.pdf>
4. Apparel industry to lay off 30% workforce (The Sunday Times, Apr 05, 2020) . <http://www.sundaytimes.lk/200405/business-times/apparel-industry-to-lay-off-30-workforce-399059.html>
5. Cambodia says 91 garment factories suspend work due to coronavirus, 61,500 workers affected (Reuters, Apr 01, 2020) . <https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-cambodia-garments/cambodia-says-91-garment-factories-suspend-work-due-to-coronavirus-61500-workers-affected-idUSL4N2BP3KY>
6. Coronavirus: Indonesia’s migrant workers urged not to return home as Widodo declares state of emergency (SCMP, Mar 31, 2020). <https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3077799/coronavirus-indonesias-migrant-workers-urged-not8>